

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban pada tahun berikutnya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154); dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan tugas Kesekretariatan, Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- 1.3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum;
- 1.4. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemerintahan umum;
- 1.5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemerintahan umum;
- 1.6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan umum;
- 1.7. Penyelenggaran administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta progam dan pelaporan;
- 1.8. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- 1.9. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

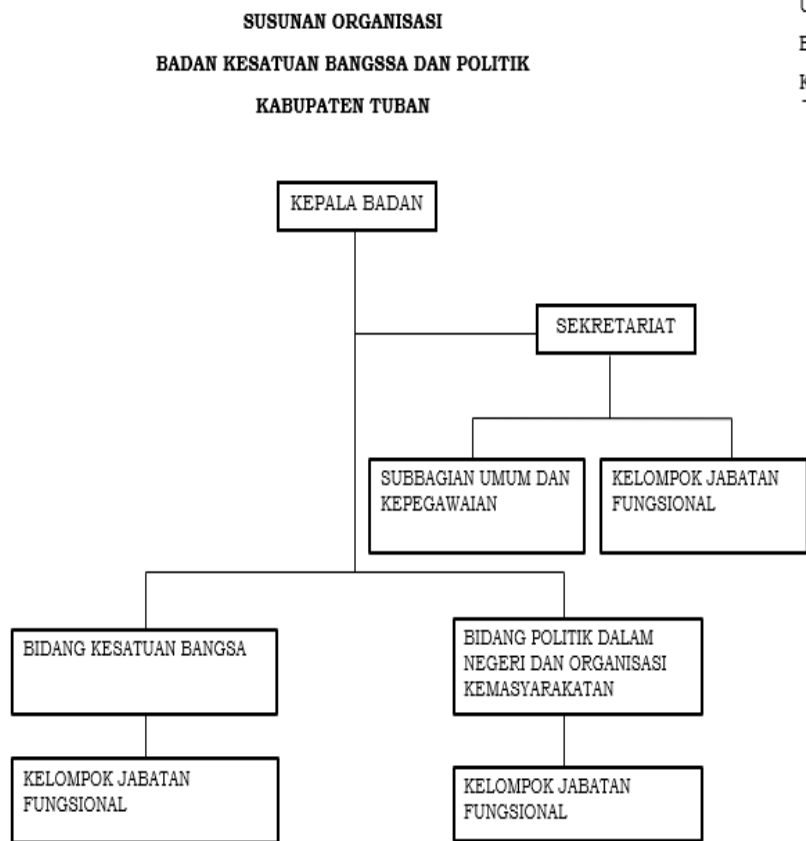
- 1.10. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- 1.11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan susunan organisasinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi Sub Bagian terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang- Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kesatuan Bangsa, , terdiri dari : Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari: Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN.



Berikut adalah uraian tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Sekretaris.

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan urusan pembangunan pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. Pelaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Pelaksanakan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyelenggarakan administrasi keuangan;
- g. Pelaksanakan penyusunan program dan laporan;
- h. Pelaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. Penyelenggarakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan ;
- j. Pelaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. Pelaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan di bidang penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapkan dan menyediakan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. Penyiapan dan Penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;

- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Badan;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan penunjang urusan perkantoran;
- f. Penyiapan dan penyediaan terkait produk hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan laporan /pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

1.2.1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan di bidang penyiapan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyediakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
- d. Mengelola dan membayar gaji pegawai;
- e. Melaksanakan verifikasi tata usaha keuangan;
- f. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Perencana Ahli Muda

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan di bidang penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan penyusunan program;
- b. Menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang;

- c. Menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
- d. Menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Menyiapkan dan menyediakan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
- f. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang kesatuan bangsa dalam melaksanakan tugas bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang Kesatuan Bangsa;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa;
- c. Pelaksanaan koordinasi ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- d. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan dini dan penanganan konflik ;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang kesatuan bangsa;
- f. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier ;
- f. Pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada kepala badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan terkait dengan fungsinya.

2.1. Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

1.1.1. Analis Kebijakan Ahli Muda Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan di bidang penyiapan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan

karakter bangsa;

- b. Menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- e. Menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- f. Menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- g. Menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- h. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- i. Menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- j. Menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- k. Menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- l. Menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;

- m. Menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- n. Menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- o. Menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- p. Menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- q. Menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi rencana aksi nasional hak asasi manusia;
- r. Menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- s. Menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi penghayat kepercayaan;
- t. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- u. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan.

1.1.2. Analis Kebijakan Ahli Muda kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan di bidang penyiapan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dengan fungsi sebagai berikut:

- 1.11.1. Menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- 1.11.2. Menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 1.11.3. Menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 1.11.4. Menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 1.11.5. Menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 1.11.6. Menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 1.11.7. Menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 1.11.8. Menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

1.11.9. Menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

1.11.10. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan

1.11.11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
3. Pelaksanaan pengawasan politik dalam negeri;
4. Pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
5. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
6. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
7. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas fungsinya.

3.1. Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

3.1.1. Analis Kebijakan Ahli Muda Politik Dalam Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan di bidang penyiapan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang politik dalam negeri dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, serta pemantauan situasi politik;

- b. Menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- c. Menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- d. Menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- e. Menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- f. Menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- g. Menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi serta pemantauan situasi politik;
- h. Menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi lembaga pemerintah pusat di daerah;
- i. Menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi perwakilan dan partai politik;
- j. Menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
- k. Menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi dan optimalisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- l. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

3.1.2. Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan di bidang penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang organisasi kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menyediakan bahan perencanaan di bidang organisasi kemasyarakatan;

- b.Menyiapkan dan menyediakan bahan pengelolaan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- c.Menyiapkan dan menyediakan bahan pengawasan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- d.Menyiapkan dan menyediakan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- e.Menyiapkan dan menyediakan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- f.Menyiapkan dan menyediakan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- g.Menyiapkan dan menyediakan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang organisasi kemasyarakatan;
- h.Menyiapkan dan menyediakan bahan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- i. Melaksanakan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Sumber daya yang dimiliki di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/moodal). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai
Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sampai dengan Desember 2025 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.1

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah	16
2	PPPK	5
3	Non PNS	3
Jumlah		24

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
	PNS :	
1	S3/Doktor	1
2	S2/Pasca Sarjana	3
3	S1/Sarjana	6
4	Diploma III	1
5	SLTA	5
	PPPK :	
1	S1/Sarjana	4
2	SLTA	1
	Non PNS :	
1	S1/Sarjana	3
Jumlah		24

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 1.3

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	2
2	Pembina Tk.1	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	2
4	Penata Tingkat I	III/d	3
5	Penata	III/c	0
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	0
7	Penata Muda	III/a	4
8	Pengatur Tingkat I	II/d	2
9	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda Tk I	II/b	
Jumlah			16

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 1.4

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Struktural	5
2	Fungsional Tertentu/JFT	4
3	Fungsional Umum	15
Jumlah		24

e. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.5

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	14
2	Perempuan	10
Jumlah		24

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, adalah masih tingginya potensi konflik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat dengan karakteristik masyarakat Tuban yang heterogen dapat memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan, baik di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Wawasan Kebangsaan.

A. Bidang Politik Dalam Negeri :

1. Kurang Optimal pembinaan terhadap Ormas guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Kurang Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan perkembangan politik;
4. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
5. Masih rendahnya koordinasi politik dan munculnya sikap apatis terhadap pemerintah.

B. Bidang Wawasan Kebangsaan :

B.1. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1. Munculnya paham radikalisme dan mulai lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;

2. Rendahnya perilaku sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan;
3. Masih rendahnya kerukunan hidup antar umat beragama, terjadinya perselisihan antar sesama umat beragama dan peolakan terhadap pendirian tempat ibadah dan ajaran-ajaran agama yang tidak sepaham dengan mayoritas masyarakat;
4. Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.
5. Munculnya ajaran/ aliran yang dianggap menyimpang dari pokok - pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.
6. Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda.

B.2. Kewaspadaan Nasional

Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi konflik, sehingga masyarakat mudah dipengaruhi.
2. Terjadinya konflik dan kerawanan, karena munculnya paham radikalisme di Masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian. Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, Pelaksanaan TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1. Renstra Tahun 2021-2026

Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sesuai RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 telah dirumuskan visi sebagai berikut:

“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Tuban dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan Visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi, sebagai berikut:

1. Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, kearifan lokal;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih;
4. Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, professional, transparan, akuntabel, dan system pengawasan yang efektif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan *misi yang pertama*, yakni Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan

pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, kearifan lokal.

Untuk mencapai sasaran diatas strategi yang diambil sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

2.1.2.Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan penyusunan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, diarahkan untuk membantu pencapaian tujuan politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban (RPJMD) Tahun 2025-2029, khususnya Misi ke tiga, yang berbunyi : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Kearifan Lokal”.

Indikator Kinerja Utama (IKU/ *Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menjadi kewajiban instansi pemerintahan untuk menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya IKU secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan tersebut sebagai acuan kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, maupun dalam evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Gambaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun (n)
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai Indeks Harmoni Indonesia IHAI ini menggunakan WELLBEING Metodologi, yg melihat dari aspek - PERSEPSI – PARTISIPASI - AKSEPTABILITAS. Variabel Dimensi & INDIKATOR 1. HARMONI EKONOMI (30%) : Ketersediaan dan aksesibilitas pangan, Keadilan dan Kesejahteraan 2. HARMONI SOSIAL (23%) : Pluralisme, Pendidikan, Kewarganegaraan 3. HARMONI BUDAYA / CULTURAL (22%) : Akulturasi, Keberagaman, Kearifan Lokal 4. HARMONI RELIGIUS (25%) : Toleransi, Kerjasama, Kesetaraan	100

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (perencanaan Awal/Lama)

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik .

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2025 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban 2024 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024.

Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu :
“Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis”, mempunyai 1(satu) indikator yaitu “Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan”.

Berikut Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang Harmonis	Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2024.

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tuban melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp10.637.487.846,00 yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tuban Tahun 2025.

2.2.2. Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Perubahan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan pada perubahan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan dokumen perencanaan pembangunan.

Pada pertengahan tahun 2025 ini telah disusun RPJMD dan Renstra periode Tahun 2025-2029, yang mana mulai dari Tujuan, Sasaran beserta indikatornya banyak mengalami perubahan. Untuk Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Tahun 2025-2029 mempunyai Tujuan dan Sasaran yaitu “Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis” dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia (IHAI).

Berikut Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Perubahan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada tabel

dibawah ini :

Tabel 2.2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,01

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2024.

Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tuban melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp9.593.329.330,00 yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tuban Tahun 2025.

2.2.3. Ringkasan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut adalah Tabel perbedaan indikator berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2021-2026:

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang Harmonis	Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	Untuk sasarannya sama namun untuk indikatornya berbeda

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Berikut adalah capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan Tiga Tahun 2025 :

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah*	0 (Poin)	4.184.820.528	0 (Poin)	6.861.722.502		
	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	83.35 (Poin)	10.479.184.813	0 (Poin)	2.398.873.723	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
	Jumlah Jenis Pengadaan BMD**	0 (Jenis)	0	0 (Jenis)	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	0 (Unit)	0	0 (Unit)	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun**	18 (Dokumen)	491.496.472	8 (Dokumen)	32.991.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah	4	368.126.0	2	23.469.00	Sub Kegiatan	Renja Tahun

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	(Dokumen))	73	(Dokumen)	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2026 dan Perubahan Renja Tahun 2025
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi**	3 (Laporan)	2.144.750	3 (Laporan)	1.788.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan dokumen LKPJ, LPPD dan LKJiP
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	4 (Laporan)	110.036.649	3 (Laporan)	7.733.500	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen evaluasi triwulanan
	Jumlah laporan keuangan dan keuangan yang tersusun	8 (Laporan)	2.883.484.963	10 (Laporan)	2.072.029.675	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	19 (Orang/ Bulan)	7.792.078.448	21 (Orang/ Bulan)	2.030.285.675	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	11 (Dokumen)	183.194.000	9 (Dokumen)	40.555.500	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan Dokumen Administrasi Tugas ASN
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	9 (Dokumen)	2.347.000	9 (Dokumen)	449.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Akuntansi SKPD**						
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	2 (Laporan)	2.878.000	2 (Laporan)	232.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan /Semesteran SKPD**	4 (Laporan)	1.505.750	3 (Laporan)	145.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Triwulanan SKPD
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	2 (Dokume n)	2.279.000	2 (Dokume n)	362.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran
	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum**	11 (Layana n)	800.533.530	11 (Layanan)	91.571.493	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah	5 (Paket)	21.059.23	5 (Paket)	4.615.500	Sub Kegiatan	Pembelian

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**		1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	5 (Paket)	76.839.125	5 (Paket)	9.009.930	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian mamin staff atau pegawai kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	35 (Paket)	158.412.313	35 (Paket)	32.545.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian mamin staff atau pegawai kantor
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	5 (Paket)	59.866.410	5 (Paket)	11.297.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembelian map dan fotokopi kantor
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangU ndangan yang Disediakan**	5 (Dokumen)	2.885.000	3 (Dokumen)	1.510.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan koran dan majalah kantor
	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	309 (Laporan)	476.071.451	37 (Laporan)	32.593.563	Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya perjalanan dinas
	Jumlah pengadaan	4 (Jasa)	159.178.538	1 (Jasa)	134.434.405	Penyediaan Jasa	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	jasa penunjang**					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	20 (Laporan)	1.060.000	0 (Laporan)	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perjalanan dinas dalam daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	6 (Laporan)	139.017.69	9 (Laporan)	43.647.810	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembelian token listrik, pasang meter baru dan tagihan air beserta listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	13 (Laporan)	30.205.550	1 (Laporan)	9.465.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian peralatan kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	15 (Laporan)	194.924.048	2 (Laporan)	81.321.595	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembelian cairan pembersih dll, serta honor tenaga kebersihan kantor
	Jumlah pemeliharaan BMD**	12 (Unit)	397.408.416	2 (Unit)	67.847.150	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Kendaraan	12 (Unit)	125.847.050	1 (Unit)	59.909.150	Penyediaan Jasa	Pembiayaan pajak

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dan perawatan
	Jumlah Mebel yang Dipelihara**	5 (Unit)	16.355.000	0 (Unit)	420.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pembiayaan perawatan mebler
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	5 (Unit)	44.654.500	5 (Unit)	4.267.500	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembiayaan perawatan AC
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi**	5 (Unit)	245.898.866	5 (Unit)	3.250.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembiayaan rehab atap, pembuatan kolam dan frame banner
	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai**	0 (Layanan)	0	0 (Layanan)	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan **	0 (Orang)	0	0 (Orang)	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas
Meningkatnya kehidupan masyarakat	Persentase potensi konflik sosial dan politik	100 (%)	103.936.002.008	100 (%)	4.462.848.77		

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
yang harmonis	yang terselesaikan						
	Presentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	19.05 (%)	2.756.468.980	0 (%)	905.620.329	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	3 (Dokumen)	2.756.468.980	2 (Dokumen)	905.620.329	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun**	3 (Dokumen)	892.277.235	1 (Dokumen)	671.019.329	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembentukan Paskibraka Kabupaten Tuban Tahun 2025, Pembinaan Mental Purna Paskibraka 2024, Kegiatan Korps Musik Pemkab Tuban, Kegiatan Pembekalan Korps Musik Pemkab Tuban
	Jumlah Laporan	1 (Laporan	3.975.080	1 (Laporan)	152.600.000	Pelaksanaan Monitoring	TMMD (Tentara

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* *	)				Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Manunggal Membangun Desa)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* *	1378(Orang)	610.796.587	4507 (Orang)	82.001.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Upacara PHBN, Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi FKUB dan Sosialisasi FPK, Sosialisasi P4GN
	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	100 (%)	500.815.308	57.19 (%)	16.614.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	Jumlah dokumen	3 (Dokume	500.815.308	3 (Dokume	16.614.500	Perumusan Kebijakan	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	rumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	n)		n)		Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	240 (Orang)	212.424.003	0 (Orang)	16.614.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Oragnisasi Kemasyarakatan serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Ormas
	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100 (%)	1.116.885.522	100 (%)	74.315.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	Jumlah Dokumen Perumusan	4 (Dokumen)	1.116.885.522	2 (Dokumen)	74.315.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaa n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**					Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah**	200 (Orang)	1.075.394.022	0 (Orang)	74.315.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat Koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 dan Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, dan budaya politik	50 (%)	95.449.500.412	0 (%)	3.466.298.950	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
						PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik	3 (Dokumen)	52.404.059.667	3 (Dokumen)	3.466.298.950	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	1 (Dokumen)	948.962.600	1 (Dokumen)	12.176.450	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili	Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun**					han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**	666724 (Orang)	51.602.658.078	666724 (Orang)	3.442.196.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan Honor Tenaga Non PNS dan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan	6 (Laporan)	133.981.389	2 (Laporan)	11.926.500	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Politik dalam Negeri

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-3)	Realisasi Anggaran (Sampai dengan TW-3)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**					Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

B. Capaian Atas Review/Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut adalah capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan Empat Tahun 2025 (Setelah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025) :

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah*	0 (Poin)	0	86.16 (Poin)	3.478.147.678		
	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	83.35 (Poin)	10.479.184.813	83.35 (Poin)	3.478.147.678	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Jumlah Jenis Pengadaan BMD**	0 (Jenis)	0	2 (Jenis)	7.714.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	0 (Unit)	0	2 (Unit)	7.714.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun**	18 (Dokumen)	491.496.472	9 (Dokumen)	148.600.225	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	4 (Dokumen)	368.126.073	2 (Dokumen)	118.779.725	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja Tahun 2026 dan Perubahan Renja Tahun 2025
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi**	3 (Laporan)	2.144.750	3 (Laporan)	1.788.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan dokumen LKPJ, LPPD dan LKJiP
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	4 (Laporan)	110.036.649	4 (Laporan)	28.032.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen evaluasi triwulanan
	Jumlah laporan keuangan dan keuangan	8 (Laporan)	2.883.484.963	12 (Laporan)	2.754.903.851	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	yang tersusun						
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	19 (Orang/ Bulan)	7.792.078.448	21 (Orang/ Bulan)	2.680.380.551	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	11 (Dokumen)	183.194.000	12 (Dokumen)	71.523.300	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan Dokumen Administrasi Tugas ASN
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	9 (Dokumen)	2.347.000	12 (Dokumen)	1.083.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	2 (Laporan)	2.878.000	2 (Laporan)	596.500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4 (Laporan)	1.505.750	4 (Laporan)	958.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Triwulanan SKPD

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan /Semesteran SKPD**						
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**	2 (Dokume n)	2.279.000	2 (Dokume n)	362.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran
	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum**	11 (Layana n)	800.533.530	11 (Layanan)	184.235.978	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan**	5 (Paket)	21.059.231	5 (Paket)	14.312.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Pembelian alat listrik kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	5 (Paket)	76.839.125	5 (Paket)	36.226.670	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian mamin staff atau pegawai kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan**	35 (Paket)	158.412.313	35 (Paket)	58.423.500	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian mamin staff atau pegawai kantor
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	5 (Paket)	59.866.410	5 (Paket)	22.763.700	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembelian map dan fotokopi kantor

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Disediakan**						
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangU ndangan yang Disediakan**	5 (Dokume n)	2.885.000	12 (Dokume n)	1.915.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan koran dan majalah kantor
	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	309 (Laporan)	476.071.451	52 (Laporan)	50.594.608	Sub Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya perjalanan dinas
	Jumlah pengadaan jasa penunjang**	4 (Jasa)	159.178.538	4 (Jasa)	194.690.534	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	20 (Laporan)	1.060.000	0 (Laporan)	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perjalanan dinas dalam daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	12 (Laporan)	139.017.690	12 (Laporan)	63.532.720	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembelian token listrik, pasang meter baru dan tagihan air beserta listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	13 (Laporan)	30.205.550	6 (Laporan)	15.662.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian peralatan kantor

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Kantor yang Disediakan**						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	15 (Laporan)	194.924.048	6 (Laporan)	115.495.814	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Jumlah pemeliharaan BMD**	12 (Unit)	397.408.416	12 (Unit)	187.036.590	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembelian cairan pembersih dll, serta honor tenaga kebersihan kantor
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	12 (Unit)	125.847.050	12 (Unit)	131.687.090	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara**	5 (Unit)	16.355.000	5 (Unit)	4.942.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pembiayaan pajak kendaraan dan perawatan
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	5 (Unit)	44.654.500	5 (Unit)	10.740.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembiayaan perawatan mebeler
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	5 (Unit)	245.898.866	5 (Unit)	39.667.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Pembiayaan perawatan AC

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi**					atau Bangunan Lainnya	
	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai**	0 (Layana n)	0	1 (Layanan)	966.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembiayaan rehab atap, pembuatan kolam dan frame banner
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan **	0 (Orang)	0	1 (Orang)	966.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya	Pengadaan Pakaian Dinas
Meningkat nya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	100 (%)	103.936.002.008	100 (%)	5.262.745.524		
	Presentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	19,05 (%)	2.756.468.980	100 (%)	1.458.924.073	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila	3 (Dokume n)	2.756.468.980	3 (Dokume n)	1.458.924.073	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	dan Karakter Kebangsaan* *						
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun**	3 (Dokumen)	892.277.235	1 (Dokumen)	965.965.499	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembentukan Paskibraka Kabupaten Tuban Tahun 2025, Pembinaan Mental Purna Paskibraka 2024, Kegiatan Korps Musik Pemkab Tuban, Kegiatan Pembekalan Korps Musik Pemkab Tuban
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* *	1 (Laporan)	3.975.080	1 (Laporan)	152.600.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa)

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* *	1378 (Orang)	610.796.587	5807 (Orang)	340.358.574	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Upacara PHBN, Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi FKUB dan Sosialisasi FPK, Sosialisasi P4GN
	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	100 (%)	500.815.308	100 (%)	86.506.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	Jumlah dokumen rumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakan**	3 (Dokumen)	500.815.308	3 (Dokumen)	86.506.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	240 (Orang)	212.424.003	100 (Orang)	86.506.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Oragnisasi Kemasyarakatan serta

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**					Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Ormas
	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanju ti	100 (%)	1.116.885.522	100 (%)	165.883.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaa n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	4 (Dokume n)	1.116.885.522	4 (Dokume n)	165.883.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama	200 (Orang)	1.075.394.022	75 (Orang)	165.883.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Kegiatan Rapat Koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 dan Hibah Forum Kewaspadaan

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**					Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dini Masyarakat
	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, dan budaya politik	50 (%)	95.449.50 0.412	0 (%)	3.551.4 32.451	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik	3 (Dokumen)	52.404.05 9.667	3 (Dokumen)	3.551.432 .451	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
						Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun**	1 (Dokumen)	948.962.600	1 (Dokumen)	32.876.450	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025.
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika	666724 (Orang)	51.602.658.078	666724 (Orang)	3.457.808.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Kegiatan Honor Tenaga Non PNS dan Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**					Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	6 (Laporan)	133.981.389	6 (Laporan)	60.748.001	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Politik dalam Negeri

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Realisasi Kinerja (Sampai dengan TW-4)	Program Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah di laksanakan
	Politik di Daerah**						

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tuban melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tuban Tahun 2025.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tuban berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

Pada periode Renstra Tahun 2021-2026 untuk Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban adalah “Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis” dengan indikator : Indeks toleransi / Indeks Kerukunan Hidup, dari target 91,03 realisasi 91,11 pencapaian kinerja tujuan 100%. Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban adalah “Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis” dengan indikator kinerja “Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan”,

pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban meningkat 100% dari target 100% realisasi 100%.

Kemudian pada Renstra Tahun 2025-2029 untuk Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban adalah “Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis”, dari target 7,01 realisasi 7,01 pencapaian kinerja tujuan 100%. Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban adalah “Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis” dengan indikator kinerja Indeks Harmoni Indonesia dari target 7,01 realisasi 7,01 pencapaian kinerja tujuan 100%.

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	<u>Tujuan:</u> Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis		Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100
	<u>Sasaran:</u> Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis		Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	83,51 (A)	83,35 (A)	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun	9	9	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100
	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil	3	3	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			
	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	100
	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan keuangan yang tersusun	11	11	100
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9	19	100
	Tersusunnya dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	9	1001
	Tersusunnya dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9	9	100
	Tersusunnya laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100
	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	3	3	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	n/Semes teran SKPD					
	Tersusunnya dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1
	Terlaksananya Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan peningkatan kedisiplinan dan kompetensi pegawai	25	25	100
	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	25	100
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan pengadaan administrasi umum	11	11	100
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	100
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatn dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27	35	100
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	100
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	10	10	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	45	45	100
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan BMD	4	4	100
	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang	4	4	100
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan jasa penunjang	4	4	100
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	6	100
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, submer daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	6	100
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	100
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	6	100
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD	12	12	100
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	11	11	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya			
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	5	100
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	100
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5	5	100
B	Meningkatnya Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	95	100	100
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	3	3	100
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideology Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3	3	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.278	3.710	290
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideology Wawsan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	1	100
C	Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik	100	100	100
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang politik	3	3	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Politik				
	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik.di Daerah	Sub Kegiatan penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	1	100
	Terlaksananya Koordinasi Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik.di	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	666.724	666.724	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	Daerah					
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik.di Daerah	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6	6	100
D	Meningkatnya pemberdayaan Ormas	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	60	100	100
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	3	3	100
	Terlaksananya Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	200	200	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
E	Meningkatnya kualitas mediasi dalam pengcgaan potensi konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penangan konflik sosial	4	4	100
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200	75	37,5

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja 2021			Indikator Kinerja 2022			Indikator Kinerja 2023			Indikator Kinerja 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan: Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	Indeks toleransi/ Indeks Kerukunan Hidup	-	-	-	89	89,64	101	90,26	90,28	100	91,03	91,11	100
Sasaran: Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase potensi konflik social dan politik yang terselesaikan	70	100	142	71	100	141	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.1.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2025 - 2029

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Tujuan : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100
Sasaran: Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra)

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Periode Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
Tujuan: Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,61	92,11%
Sasaran: Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,61	92,11%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dari realisasi tahun 2025 yaitu 7,01 dari target akhir Renstra yaitu 7,61, maka tingkat kemajuan 92,11%.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Organisasi Lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Organisasi lain

KABUPATEN/KOTA	SKOR IHAI
KABUPATEN PACITAN	7,04
KABUPATEN PONOROGO	6,90
KABUPATEN TRENGGALEK	7,05
KABUPATEN BLITAR	6,73
KABUPATEN KEDIRI	7,12
KABUPATEN MALANG	6,90
KABUPATEN JEMBER	6,65
KABUPATEN BANYUWANGI	7,03
KABUPATEN SITUBONDO	6,81

KABUPATEN/KOTA	SKOR IHAI
KABUPATEN SIDOARJO	6,99
KABUPATEN MOJOKERTO	6,79
KABUPATEN JOMBANG	6,84
KABUPATEN NGAWI	7,07
KABUPATEN BOJONEGORO	7,23
KABUPATEN TUBAN	7,01
KABUPATEN LAMONGAN	6,58
KABUPATEN PAMEKASAN	6,92
KABUPATEN SUMENEP	6,70
KOTA BLITAR	6,91
KOTA PROBOLINGGO	6,95
KOTA PASURUAN	7,05
KOTA MADIUN	7,21
KOTA SURABAYA	7,30

Dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja Indeks Harmoni Indonesia capaian Kabupaten Tuban Adalah 7,01, dinyatakan tercapai dengan baik. Data hasil kajian Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025 mencakup berbagai aspek penting dalam menilai kondisi ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman di Kabupaten Tuban.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi perbaikan / rencana tindak lanjut
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	1.Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik di dalam internal OPD; 2.Adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik di	Pada pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025 tidak terdapat hambatan yang rumit, hanya saja	Alternatif Solusi untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah meningkatkan

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi perbaikan / rencana tindak lanjut
		lingkup eksternal OPD; 3.Adanya alokasi anggaran yang sesuai untuk peruntukannya; 4.Adanya kelengkapan dokumen pendukung. 5.Adanya ketidaktercapaian dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	ada perubahan dasar hukum pada pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berjalan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.	koordinasi dan sinkronisasi agar program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

3.1.6.Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2025 telah dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran, mulai dari efisiensi anggaran perjalanan dinas, anggaran lembur, anggaran makan minum rapat, anggaran sarana dan prasarana. Kegiatan rapat luar kota sudah sangat diminimalisir, dengan dialihkan melalui zoom meeting.

Tabel 3.1.6 Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kinerja Anggaran Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	<u>Tujuan:</u> Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100	91,11	8,89
1	<u>Sasaran:</u> Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Harmoni Indonesia	7,01	7,01	100	91,11	8,89
1	<u>Program:</u> Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	95	100	105,26	92,54	12,72
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, dan budaya politik	100	100	100	99,77	0,23
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	60	57,5	95,83	97,76	1,93

No.	Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100	90,25	9,75
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,51	83,35	99,8	83,11	16,69

Melalui tabel tersebut, secara umum upaya pencapaian sasaran strategis organisasi dapat dikatakan efisien. Hal ini dikarenakan rata- rata realisasi program dapat mencapai 100%, dengan realisasi anggaran lebih rendah atau maksimal sebesar 91,11%. Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota tidak dapat tercapai sesuai target dikarenakan saat evaluasi SAKIP, dokumen perencanaan masih dalam penyusunan.

**3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif.

Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah tersebut diatas, antara lain pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator	Program Unggulan	Alasan mengapa program / kegiatan / tersebut menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian / inovasi
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Memahami Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) : - Penetapan anggota pasukan yang bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia - Terbentuknya kader pemimpin bangsa yang memiliki karakter Pancasila, berjiwa nasionalisme, cinta tanah air, disiplin dan memiliki pengetahuan kebangsaan; Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasionalisme (PHBN) : - Penguatan karakter Pancasila, peningkatan nasionalisme dan tentunya nilai-nilai bela negara di kalangan aparatur pemerintahan, generasi muda dan masyarakat luas.

Sasaran	Indikator	Program Unggulan	Alasan mengapa program / kegiatan / tersebut menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian / inovasi
Meningkatnya Kewaspadaaan Dini Terhadap Potensi Konflik	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Dapat Dicegah	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan penanganan konflik sosial	Mencegah konflik sosial melalui dialog cipta kondisi dan pelaksanaan aplikasi SILADENI
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif di Kabupaten Tuban	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan; - Meningkatkan akuntabilitas dan administrasi organisasi kemasyarakatan; - Memudahkan pelaporan organisasi kemasyarakatan dapat terorganisir dengan baik dengan adanya aplikasi SIPOLMAS. Dengan adanya aplikasi SIPOLMAS data organisasi kemasyarakatan dapat terorganisir dengan baik.
Meningkatnya Kesadaran Berpolitik Masyarakat	Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Kaderisasi	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan	- Meningkatkan tingkat partisipasi politik di masyarakat; - Meningkatkan budaya demokrasi di masyarakat.

Sasaran	Indikator	Program Unggulan	Alasan mengapa program / kegiatan / tersebut menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian / inovasi
		etika serta budaya politik	

3.2. REALISASI ANGGARAN

Sedangkan kondisi khusus dari target dan realisasi anggaran per kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	4,184,820,528.00	3,478,147,678.00	83,11
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153,110,845.00	148,600,225.00	97,05
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123,247,420.00	118,779,725.00	96,38
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,805,925.00	1,788,500.00	99,04
c.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,057,500.00	28,032,000.00	99,91
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,383,957,974.00	2,754,903,851.00	81,41
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,303,423,974.00	2,680,380,551.00	81,14
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75,876,000.00	71,523,300.00	94,26
c.	Sub Kegiatan Koordinasi dan	1,164,500.00	1,083,000.00	93,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
d.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,164,500.00	596,500.00	51,22
e.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	1,164,500.00	958,500.00	82,31
f.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,164,500.00	362,000.00	31,09
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	976,000.00	966,000.00	98,98
a	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	976,000.00	966,000.00	98,98
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	197,476,687.00	184,235,978.00	93,30
a.	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14,438,615.00	14,312,500.00	99,13
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,982,450.00	36,226,670.00	92,93
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66,656,613.00	58,423,500.00	87,65
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	22,766,050.00	22,763,700.00	99,99

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	cetakan dan penggandaan			
e.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,428,400.00	1,915,000.00	55,86
f.	Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51,204,559.00	50,594,608.00	98,81
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,098,595.00	7,714,500.00	95,26
a.	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	8,098,595.00	7,714,500.00	95,26
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,415,405.00	194,690,534.00	93,41
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1,032,469.00	0	0
b.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68,975,155.00	63,532,720.00	92,11
c.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15,868,221.00	15,662,000.00	98,7
d.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	122,539,560.00	115,495,814.00	94,25
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232,785,022.00	187,036,590.00	80,35

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173,540,672.00	131,687,090.00	75,88
b.	Sub Kegiatan pemeliharaan mebel	4,960,000.00	4,942,000.00	99,64
c.	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10,783,600.00	10,740,000.00	99,60
d.	Sub Kegiatan pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43,500,750.00	39,667,500.00	91,19
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,576,597,578.00	1,458,924,073.00	92,54
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,576,597,578.00	1,458,924,073.00	92,54
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	984,708,577.00	965,965,499.00	98,10
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	438,271,545.00	340,358,574.00	77,66

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
c	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	153,617,456.00	152,600,000.00	99,34
C	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	88,488,176.00	86,506,000.00	97,76
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	88,488,176.00	86,506,000.00	97,76
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	88,488,176.00	86,506,000.00	97,76
D	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kulalitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial	183,798,924.00	165,883,000.00	90,25

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	183,798,924.00	165,883,000.00	90,25
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	183,798,924.00	165,883,000.00	90,25
D	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,559,624,124.00	3,551,432,451.00	99,77
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	3,559,624,124.00	3,551,432,451.00	99,77

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Pemantauan Situasi Politik			
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40,277,720.00	32,876,450.00	81,62
b	Pelaksanaan Koordinasi Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,458,521,180.00	3,457,808,000.00	99,98
c	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	60,825,224.00	60,748,001.00	99,87

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			

Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berlangsung secara efisien. Dengan berdasar pada penghitungan pencapaian output kegiatan, dari 5 program, 11 kegiatan dan 33 subkegiatan yang ada, mencapai target nonfisik hingga 91,11%.

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada sebagian besar kegiatan lainnya secara umum disebabkan adanya komitmen bersama antara pimpinan dan juga pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, disertai dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Secara umum tujuan, sasaran strategis ataupun program/kegiatan satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui dua beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2025 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan atas tujuan, sasaran strategis maupun program/kegiatan yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pada pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025 tidak terdapat permasalahan/kendala yang rumit, hanya saja ada perubahan dasar hukum pada pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berjalan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Adapun strategi peningkatan kinerja di masa datang diantaranya yaitu :

1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat untuk mewujudkan *good governance* dengan cara SOP;
2. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut;
3. Penyelenggaraan pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran dan disiplin pegawai.

Semoga Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban Tahun 2025 yang telah disusun ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan guna perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban di masa-masa mendatang.

Tuban, 26 Januari 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN



Drs. YUDI IRWANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP : 19680915 198911 1 001